BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik di Timur-Tengah merupakan kelanjutan dari permasalahan bangsa Palestina yang masih memperjuangkan dan mempertahankan hak atas tanah airnya dari penjajahan dan pendudukan yang berlangsung hampir seumur hidupnya, mulai dari perang Arab-Israel sampai pada perang Palestina-Israel. Palestina tidak pernah dapat mencapai menjadi sebuah negara yang merdeka yang dicita-citakan oleh bangsanya juga negara-negara Arab. Kekuatan yang tidak seimbang dalam sumberdaya manusia, pasukan militer, alat-alat perang, bantuan dana, antara Israel dan Palestina menjadi kekalahan yang terus menerus dialami oleh bangsa Palestina. Konflik panjang antar keduanya hanya membuahkan kesepakatan damai yang tidak pernah terealisasi (Rais, 1993: 22).

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina termasuk konflik yang paling rumit di Timur-Tengah. Setelah bangsa Israel berdiri sebagai sebuah negara di tanah Palestina pada tanggal 14 Mei 1948, sejak itu timbul ketegangan di kawasan Timur Tengah. Berawal dari Israel yang memperlihatkan sikap konfrontasinya dalam memperebutkan wilayah Palestina untuk dijadikan wilayah kedaulatan negaranya. Israel dan Palestina sama-sama mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas wilayah yang mereka tempati (Basyar,1993: 49).

Berdirinya negara Israel tidak lepas dari pengaruh Doctrin (Theodore Herzl, 1896) tentang Zionisme yang mengatakan bahwa:

> "*Kami adalah masyarakat. Kami mencoba untuk tetap hidup dan berbaur dengan masyarakat lain. Kami tidak di hargai. Begitu banyak penyerangan*

> *pada orang-orang Yahudi di berbagai negara, Rusia, Rumania, Jerman, Perancis. Saya tidak percaya adanya kedamaian lagi. Jadi ijinkan kami untuk memerintah sebuah area di dunia ini. Di mana kami dapat mendirikan negara kami sendiri. Ada dua wilayah yang sesuai, Palestina dan Argentina. Pada kedua wilayah ini, banyak orang Yahudi tinggal. Kami akan mencapai kesepakatan dengan penduduk yang telah ada dan menawarkan untuk membangun jalan-jalan yang baru, misalnya. Pendirian negara kami yang baru melalui berbagai cara*"(Jun, 2008: 16-17).

Zionisme sendiri adalah kerinduan yang sahih dari suatu bangsa yang tertindas untuk memiliki tanah air. Saat itu kaum Yahudi mempercayai bahwa tanah Palestina adalah tanah leluhur mereka, dimana terdapat sebuah bukit suci bernama bukit Zion. Kaum Yahudi berkeinginan untuk membentuk *The Jewish State*. Untuk merealisasikannya mereka ingin mewujudkan koloni Yahudi di Palestina, mendapat pengakuan dunia dalam menduduki Palestina dan membentuk organisasi dalam penyatuan kaum Yahudi. Pada saat itu Palestina merupakan wilayah mandat pemerintahan Inggris. Dengan melihat keinginan Israel, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour menjanjikan tanah Palestina untuk dijadikan hak milik Israel. Balfour mengirimkan pernyataan kepada Lord Rothschild, Presiden Federasi Zionis Inggris untuk dapat mewujudkannya. Isi dari Deklarasi Balfour :

> "*saya begitu senang menyampaikan pada Anda, atas nama pemerintahan Yang Mulia mendukung pembentukan di dalam Palestina sebagai kampung halaman nasional bagi orang-orang Yahudi, dan akan mengusahakan segala sesuatu untuk mencapai tujuan ini. Hal ini dapat dimengerti bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi pihak sipil dan hak-hak keagamaan komunitas non-Yahudi di Palestina* (Jun, 2008: 19-20).

Sejak deklarasi Balfour, Inggris mulai memberikan izin bagi kaum Yahudi untuk masuk ke Palestina di bawah kekuasaan Inggris. Kaum Yahudi mulai memiliki otoritas penuh untuk membentuk identitas spiritual, religius dan nasionalnya di wilayah Palestina (Jun, 2008: 22). Dan menurut *United Nation Year Book* setelah berdiri sebagai sebuah

negara di Israel terjadi pengusiran terhadap penduduk Palestina dan pelarangan kembali penduduk Palestina dari negara Israel yang baru di bentuk tersebut.

Sementara itu terdorong oleh keinginan untuk memperoleh kediamannya kembali, sejak tahun 1987, bangsa Palestina melakukan Intifadah terhadap pemerintahan Israel dalam berbagai bentuk mulai dari melempar bom, boikot atas berbagai produk Israel, tidak membayar pajak maupun cukai, pemogokan dan pengunduran diri secara massal para pegawai Arab yang ditunjuk oleh pemerintah Israel (Jun, 2008: 47-48).

Intifadah pertama dimulai pada desember 1987 dengan pemuda Palestina yang membalas pembunuhan enam anak-anak Palestina oleh tentara-tentara Israel. Orang-orang Palestina dari semua kalangan baik yang paling muda maupun yang paling tua menentang kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel dengan melakukan perlawanan dengan sambitan batu dan apa pun yang dapat mereka temukan. Serangan tersebut kemudian dibalas oleh tentara Israel kepada Warga Palestina yang hidup di daerah-daerah pendudukan seperti Jalur Gaza dan Tepi barat. Terjadinya peristiwa Intifadah pertama ini merupakan puncak dari amarah rakyat Palestina (Yahya, 2005: 1).

Peristiwa ini menggerakan seluruh rakyat Palestina untuk bangkit melawan Israel yang dianggap sebagai penjajah. Peristiwa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Palestina ini kemudian menjadi peristiwa yang teroganisir di tingkat lokal dan regional. Intifadah pertama ini mendapat tanggapan yang sangat keras dari Israel sampai akhirnya terjadi kesepakatan Oslo tahun 1993 dimana Israel dan PLO duduk bersama di meja perundingan yang untuk pertama kalinya Israel mengakui Yasser Arafat sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina (http://www.hdip.org).

Intifadah kedua terjadi pada tahun 2000 ketika Ariel Sharon bersama 1200 polisi Israel melakukan kunjungan ke Masjid Al Aqsha yang dianggap sebagai tindakan pelecehan terhadap tempat suci umat Islam karena tujuan utamanya adalah ingin menghancurkan Masjid Al Aqsha secara perlahan-lahan dan kemudian membangun Haikal Sulaiman. Kejadian ini yang menyebabkan bangkitnya Intifadah kedua. Selama berlangsungnya Intifadah kedua di Palestina, 70% penduduk yang terdiri atas kalangan muda dan anak-anak mengalami perpindahan, pengusiran, penahanan, pemenjaraan dan pembantaian sejak pendudukan tahun 1948 (*The Palestine Chronicle*, wartawan-penulis Ruth Anderson dalam www.dci-pal.org).

Sejak hari pertama intifadah kedua, tentara Israel menanggapi lemparan batu orang-orang Palestina dengan serangan helikopter, tank dan senjata modern. Sejauh ini, lebih dari warga sipil kehilangan jiwanya dan hampir 20.000 terluka. Rumah-rumah dan taman-taman Palestina dihancurkan bulldozer-bulldozer Israel, perekonomian Palestina menderita kerugian besar dan sejumlah 50% lebih rakyatnya miskin. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Palestina sekitar 1000 orang yang terbunuh selama intifadah kedua bahkan belum berusia 18 tahun dan bahwa 84% dari mereka yang tewas tidak pernah ikut dalam bentrokan maupun demonstrasi.

Dan menurut angka-angka yang diperoleh dari data berbagai organisasi seperti palang merah, PBB sejumlah total 4000 bangunan mengalami kerusakan parah, sementara 6584 rumah rusak sebagian. Dari rumah-rumah ini, 580 di musnahkan sepenuhnya. Bangunan yang rusak meliputi 30 Masjid, 12 gereja dan 134 unit penyimpanan. Kemudian sekolah, 66 buah sepenuhnya tak dapat digunakan dan 275 lainnya rusak berat. Tujuh dari sekolah yang rusak telah menjadi gudang-gudang militer

Israel. Disamping itu, 30 sekolah lainnya dibakar oleh tentara Israel yang menyebabkan kerusakan senilai $400.000 (Yahya, 2005: 25-28).

Saat ini, tiap hari ada laporan yang menyebutkan anak-anak dan remaja meninggal di wilayah-wilayah Palestina. Menurut Organisasi Kesehatan Palestina, dari September 2000 sampai Desember 2001 sebanyak 936 orang Palestina meninggal. Selama terjadinya konflik, para tentara Israel menjadikan warga sipil, termasuk anak-anak yang pulang sekolah menjadi sasaran pengeboman dengan helikopter. paling tidak lima anak terbunuh tiap hari dan 10 orang terluka (www.palestinechronicle.com).

Pada awal tahun 2002 kehidupan rakyat Palestina menjadi semakin keras terutama ketika Intifadah kedua memanas. Reaksi terbesar di daerah Pendudukan selama 20 tahun terakhir ialah tentara Israel mengirimkan sekitar 20.000 tentara. Menurut angka-angka yang diterbitkan PBB, selama operasi Israel dijalankan, 1620 rumah terus mengalami kerusakan berat, beserta 14 bangunan umum, termasuk beberapa sekolah. Di Jenin, dari 2500 bangunan yang ditempati 14.000 orang Palestina disana, 550 rusak. Enam rusak ringan, 541 dengan aneka kerusakan, dan tiga rusak total.

Di Balata, dari 3700 bangunan yang ditempati 20.000 orang, 670 mengalami kerusakan. Dari jumlah ini, 10 rusak total dan 14 rusak parah. Di Nur Al-Shams, 100 dari 1500 rumah tempat 8000 orang tinggal, rusak. Di Tulkarem, 300 dari 2900 bangunan yang didiami 16.000 orang rusak, enam di antaranya rusak total dan 30 rusak parah. Kerugian ekonomi keseluruhan ditaksir sekitar 3,5 juta dolar (www.tragedipalestina.com).

Tindakan yang dilakukan Israel tersebut mendapat kritik dari PBB dan Uni Eropa, yang berakhir dengan langkah pertama Amerika Serikat mengirimkan juru runding untuk

menangani krisis ini. Tank-tank Israel mulai ditarik dari wilayah Palestina dan kedua pihak memasuki perundingan keamanan. Selama penarikan, salah satu upaya penting dilakukan untuk memastikan adanya perdamaian adalah dalam bentuk sebuah rencana damai yang disampaikan oleh Pangeran Saudi Arabia, Abdullah di *The New York Times*. Menurut rencana sebagai ganti mundurnya Israel dari batas pra-1967 (menurut resolusi PBB), negara-negara Arab akan mendinginkan kembali hubungannya dengan Israel.

Usulan ini diterima positif oleh sebagian besar masyarakat Palestina.Akan tetapi, radikalisme di kedua belah pihak menghambat pelaksanannya. Dalam beberapa hari, pendudukan baru dan lebih luas dimulai dan sasarannya adalah Tepi Barat khususnya Ramallah, tempat markas besar Arafat sehingga menempatkan markas Arafat dalam kepungan, sementara itu bahaya besar dihadapi oleh penduduk sipil Palestina (www.tragedipalestina.com-harunyahya.htm).

Pengaruh besar dari Zionisme sebagai doktrin yang telah disusun oleh Theodore Herzl (1860-1904) terhadap pembentukan negara Israel sangat kuat. Zionisme memainkan peranan yang sangat besar dalam mewujudkan negara Israel yang diberi bentuk sistematis oleh Herzl (1896) dalam bukunya, negara Yahudi (Der Judenstaat) dan secara kongkret menerapkannya pada kongres Zionis sedunia yang pertama di Basel pada tahun 1987. Herzl bersama Zionis juga terbukti melakukan kerjasama dengan anti-semit untuk mendorong orang-orang Yahudi berimigrasi ke Palestina (Zainuddin, 1993: 9).

Gelombang anti-semit dan peristiwa holocaust memberi keuntungan bagi Herzl dalam menyimpulkan keadaan orang-orang Yahudi untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat khususnya Inggris dan Amerika Serikat untuk menciptakan negara bagi bangsa Yahudi. Kesimpulan Herzl, *pertama*, orang Yahudi dimanapun mereka berada, di negara manapun mereka bertempat tinggal, akan tetap merupakan sebuah

bangsa yang tunggal, konsekuensi dari kesimpulannya adalah warga yahudi yang sudah menjadi warga negara AS atau inggris, misalnya, dituntut untuk setia pada Israel, sehingga menimbulkan problema loyalitas ganda. *Kedua*, ia berpendapat, orang Yahudi selamanya dan dimana saja selalu menjadi korban pengejaran. *Ketiga*, mereka sama sekali tidak dapat diasimilasikan oleh negara-negara dimana mereka telah bertempat tinggal sekian lamanya, asumsi terakhir ini sebenarnya sama dengan asumsi kaum anti-Yahudi dan rasis (Alhadar, 2004: 17-18).

Untuk mencapai tujuannya orang-orang Yahudi radikal percaya bahwa ada tiga kejadian penting yang harus terjadi. *Pertama*, sebuah negara Israel merdeka harus didirikan di Tanah Suci dan penduduk Yahudinya harus meningkat. Pindahnya orang Yahudi ke Tanah Suci telah diwujudkan oleh para pemimpin Zionis pada awal abad kedua puluh. Di samping itu, Israel menjadi sebuah bangsa dengan negara merdeka di tahun 1948. *Kedua*, Yerusalem diambil pada tahun 1967 dalam Perang Enam Hari dan pada 1980 diumumkan sebagai ibu kota abadi Israel. *Ketiga* dan satu-satunya syarat yang masih harus dipenuhi adalah pembangunan kembali Kuil Sulaiman yang dimusnahkan 19 abad yang lalu.Akan tetapi, sekarang ada dua tempat ibadah Islam di atas tempat ini yaitu Masjid al-Aqsa dan Qubbah as-Sakhrah.

Agar orang Yahudi dapat membangun kembali Kuil Sulaiman, kedua tempat ibadah ini harus dihancurkan. Dan halangan terbesar melakukannya adalah umat Islam dunia khususnya Palestina. Selama mereka masih ada orang-orang Israel tidak dapat menghancurkan kedua tempat ini. Karena alasan tersebut para Zionis bertempur demi Yerusalem yang murni dan berusaha memurnikannya dari unsur Kristen dan Muslim (www.tragedipalestina.com).

Sejak tahun 1967 banyak kelompok dari pihak Israel yang berusaha ingin menghancurkan dan telah menyerang Masjid Al Aqsha lebih dari 100 kali. Serangan

pertama dilakukan oleh Rabbi Shlomo Goren, pendeta pada Angkatan Bersenjata Israel, pada Agustus 1967. Goren memasuki tempat suci Islam dengan 50 pria bersenjata dibawah pengawasannya. Pada 21 Agustus 1969, Zionis melancarkan tembakan langsung ke Masjid Al Aqsha yang merusak sebuah mimbar. Pada 3 Maret 1971, pengikut pemimpin radikal Gershon Solomon juga menjadikan Haram asy-Syarif sebagai sasaran.

Kemudian pada tahun 1980, sekitar 300 anggota kelompok teroris radikal Gush Emunim menggunakan senjata berat dan menyerang Masjid. Dua tahun berikutnya, seorang Israel yang membawa paspor Amerika bergerak ke Masjid dengan senapan serbu M-16 dan menembakkannya pada orang Islam yang sedang sholat, dimana dua orang Palestina tewas dan banyak lainnya terluka. Pada 10 Maret 1983, anggota Gush Emunim memanjat dinding Haram asy-Syarif dan mencoba menaruh bahan peledak dan setelah beberapa bulan kemudian dibebaskan.

Setelah serangan tersebut, sekelompok Yahudi radikal yang dipersenjatai dengan banyak alat-alat peledak termasuk lusinan granat, dinamit, dan 12 rudal mortar mencoba meledakkan Masjid Al Aqsha. Dan pada tahun 1996 para Zionis berusaha menghancurkan Masjid dari bawah dan mulai menggali terowongan besar di bawahnya dengan alasan melakukan penelitian sejarah (www.tragedipalestina.com-harunyahya.htm).

Intifadah Al Aqsha menempatkan Hamas sebagai kekuatan politik besar di Palestina. Hamas berhasil memenangkan pemilihan umum di Palestina dan dari awal terbentuk, pemerintahan Hamas menghadapi embargo dari Barat namun kelompok ini tetap pada prinsipnya yang menolak mengakui eksistensi Israel. Dibawah kepemimpinan Hamas, Para pejuang Palestina semakin yakin untuk melanjutkan intifadah. Hamas

menjadikan bom bunuh diri sebagai senjata untuk melawan Israel (www.palestinefacts.org).

Dari pemaparan di atas menjelaskan bahwa intifadah Al Alqsha sebagai balasan perlawanan Palestina terhadap sikap-sikap yang ditunjukan Israel terhadap orang-orang Palestina terutama untuk mencapai tujuannya yaitu menguasai wilayah palestina. Dan yang memprihatinkan yang menjadi korban adalah warga sipil terutama anak-anak dan wanita, selain itu kini adalah masalah perebutan Masjid Al Aqsha antara Palestina dengan Israel.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah mengapa Israel kini menjadi sebuah negara yang berkuasa penuh atas hampir seluruh wilayah Palestina, padahal sebelumnya Inggris sendiri telah mengatakan akan membagi dua tanah tersebut untuk Palestina dan Israel, mengapa sekarang negara-negara Arab yang secara ideolologis memiliki kesamaan Nasionalisme dengan Palestina kurang memperhatikan masalah Palestina sehingga masalah Palestina berlarut-larut hingga kini dan ada apa dengan dunia internasional yang memberi solusi-solusi tapi tetap tidak bisa mengakhiri konflik antara bangsa Palestina dengan Israel. Kemudian adanya pihak luar yang intervensi seperti Amerika Serikat yang memberikan sokongan senjata kepada Israel, ini juga yang membuat masalah antara Israel-Palestina tidak pernah berakhir hingga saat ini meskipun banyak kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang telah di buat.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul penelitian;

“Pengaruh Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsha terhadap kebangkitan Intifadah Kedua di Palestina”

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa *Core Subject* pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Yaitu:

1. Politik Internasional, *core subject* ini menjelaskan dalam hubungan internasional politik internasional mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangan kepentingan *(interest)* atau kekuasaan *(power)*. Dalam hal ini perlawanan Intifadah merupakan salah satu bentuk perjuangan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
2. Hukum Internasional, mata kuliah ini menjelaskan dengan adanya *aneksasi* wilayah Palestina oleh Israel sejak tahun 1948, berarti juga menyangkut konflik dan perang sehingga pasti berkaitan dengan hukum internasional.

1.2 Identifikasi Pembatasan dan perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah. Identifikasi masalah bertujuan agar kita mendapatkan sejumlah masalah yang relevan dengan judul penelitian (Suriasumantri, 1996: 309).

Melihat pada latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Masjid Al Aqsha memiliki derajat kepentingan yang tinggi bagi Palestina dan Israel ?
2. Mengapa Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsha dianggap

Penegasan terhadap kedudukan Yerusalem sebagai wilayah kedaulatan Israel ?

3. Bagaimana Intifadah Kedua bisa terjadi dan Bagaimana Intifadah kedua menyebabkan konflik antara bangsa Palestina dan Israel ?
4. Bagaimana Prospek Hubungan Palestina dan Israel Pasca Kebangkitan Intifadah Kedua ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas, yang memungkinkan kita untuk mengindentifikasikan faktor mana saja yang termasuk ke dalam lingkup permasalahan dan faktor mana yang tidak (Suriasumatri, 2001: 311).

Luasnya ruang lingkup dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini diperlukan pembatasan masalah untuk memudahkan dalam memahami pembatasan yang akan dikemukaan agar maksud dari tujuan skripsi tersampaikan, maka penulis membatasi pembahasan pada semakin besarnya Jihad Islam di Palestina selama adanya Intifadah Al Aqsha. Terjadinya intifadah kedua tahun 2000 yang merupakan puncak yang membawa HAMAS sebagai kekuatan politik terbesar di Palestina.

1.2.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertayaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya (Suriasumantri, 2001: 312).

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang di uraikan di atas, maka masalah penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : **Sejauhmana Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsha dapat menimbulkan bangkitnya Intifadah kedua?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Intifadah Kedua bisa terjadi dan Bagaimana Intifadah kedua menyebabkan konflik antara bangsa Palestina dan Israel.
2. Untuk mengetahui mengapa Masjid Al Aqsha memiliki derajat kepentingan yang tinggi bagi Palestina dan Israel.
3. Untuk mengetahui mengapa Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsha dianggap sebuah Penegasan terhadap kedudukan Yerusalem sebagai wilayah kedaulatan Israel.
4. Untuk mengetahui Bagaimana Prospek Hubungan Palestina dan Israel Pasca Kebangkitan Intifadah Kedua.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi setiap orang yang tertarik dengan masalah konflik di Timur Tengah, khususnya masalah Palestina-Israel yang kompleks dan masih belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut hingga kini.

Selain itu penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan untuk para peneliti lainnya dalam menganalisa lebih jauh mengenai fenomena konflik ini dan di harapkan dapat memicu para penstudi hubungan internasional untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah yang di uraikan dalam penelitian ini yang masih belum di ungkapkan.

1.4 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, penulis mengutip teori dan pendapat para ahli serta pernyataan yang diungkapkan oleh tokoh yang berpengaruh yang memiliki keterhubungan dengan obyek yang di teliti untuk mengungkapkan

kebenarannya. Dalam penyusunan skripsi ini, akan digunakan kerangka pemikiran dan konsep ilmiah untuk menghindari kekeliruan persepsi dan interpretasi. Dengan kata lain, teori akan memberikan suatu kerangka pemikiran bagi upaya penelitian. Upaya ini termasuk juga yang menjadi landasan suatu penelitian dalam disiplin ilmu hubungan internasional.

Hubungan Internasional sebelum perang dunia 1, mata kuliah ini masih terbatas pada sejarah diplomasi, hukum internasional dan ekonomi internasional saja. Setelah perang dunia 1 mata kuliah ini kemudian menjadi kajian tersendiri sebagai mata kuliah hubungan internasional, ditambah dengan organisasi internasional. Pada perkembangan selanjutnya perkembangan studi hubungan internasional makin kompleks dengan masuknya aktor IGOs dan INGOs serta makin kuatnya peran negara-negara di luar Amerika serikat dan Uni Soviet dalam kancah Hubungan Internasional.

Pada dekade 1980-an studi Hubungan Internasional adalah tentang interaksi yang terjadi antar negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa. Yang akhirnya hubungan internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi.

> ”Hubungan Internasional di definisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestic serta individu-individu” (Perwita dan Yani, 2005: 4).

Perjuangan orang-orang Palestina dalam melawan Israel terutama peristiwa Intifadah ini banyak melibatkan aktor-aktor hubungan internasional baik negara terutama negara-negara besar maupun aktor non negara seperti organisasi internasional baik *intergovermental* (IGO) maupun INGO. Hubungan politik di bangun dengan adanya

konflik sehingga menyebabkan adanya hubungan yang tidak harmonis di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik antara Palestina dan Israel.

> ”Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional dan monolith, jadi bisa memperhitungkan *cost* and *benefit* dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasional sehingga fokus dari penganut *realism* adalah *struggle for power* atau real politik”.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memiliki pemahaman bahwa sebuah paradigma bisa di gunakan sebagai pendekatan. Oleh karena itu peneliti menggunakan paradigma realis sebagai pendekatan.

> Asumsi-asumsi dalam paradigma Realisme di antaranya adalah :
> 1. Negara adalah aktor utama.
> 2. Keamanan nasional adalah fokus analitis : negara-negara sebagai aktor-aktor rasional yang bersatu.
> 3. Keamanan negara dan teritori adalah perhatian utamanya.
> 4. Diplomasi dilakukan terutama oleh negara yang juga aktor utama dalam organisasi internasional dan persekutuan.
> 5. Penggunaan kekuatan militer dianggap perlu dan tampaknya merupakan instrument kebijakan negara yang tidak dapat dielakan.
> 6. Keamanan internasional adalah *balance of power*, persekutuan dan keamanan kolektif akan menghasikan keteraturan (Perwita dan Yani, 2005: 25).

Aktor utama yang terlibat dalam konflik ini khususnya melibatkan dua negara yaitu Israel dan Palestina. Dari teori di atas, tersirat bahwa ketika suatu negara merasa atau berfikir tengah menghadapi suatu situasi yang kiranya dapat mengancam kedaulatan nasionalnya, maka negara tersebut akan berusaha untuk merancang dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi tingkat kerentanannya dalam menghadapi ancaman tersebut dan meminimalisir, bahkan melenyapkan sumber ancaman tersebut.

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.

Para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

> "Kepentingan nasional sebagai upaya suatu negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional"(Perwita dan Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negrinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, saperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.

Seperti halnya arti penting Palestina bagi Israel, Kepentingan Israel terhadap tanah Palestina digambarkan sebagai kepentingan vital bagi seluruh Yahudi di seluruh dunia, karena itu Israel dapat menggunakan berbagai cara dalam mencapai kepentingannya di Palestina terutama bagi arti strategis Masjid Al Aqsha kini. Di sisi lain, bangsa palestina sendiri merasa kepentingannya telah diganggu oleh Israel sejak negara Israel berdiri dan sekarang khususnya pada masalah penghancuran Masjid Al Aqsha oleh sebab itu orang-orang Palestina melakukan perlawanan, berupa Intifadah kedua.

Pendudukan yang berdampak pada perluasan wilayah Israel dan dengan tujuan ini Israel kemudian Israel menerapkan kebijakan ekspansionisme untuk menganeksasi seluruh wilayah Palestina. Dan sebagai tindakan nyata bangsa Palestina dalam mempertahankan wilayahnya dan melawan serangan Israel serta tindakan pelecehan terhadap Masjid Al Aqsha adalah dengan melakukan intifadah kedua.

Kunjungan yang dilakukan Ariel Sharon terhadap Masjid Al Aqsha menyulut kembali konflik yang telah reda karena kunjungan Ariel Sharon tersebut sebagai penegasan terhadap kedudukan Yerusalem pasca diumumkannya kemungkinan

Yerusalem dibagi dua untuk Palestina dan Israel oleh Ehud Barak. Setelah adanya jeda perdamaian dari tahun 1993 sampai tahun 2000 yang melibatkan seluruh elemen masyarakat baik pemerintahan maupun warga sipil Palestina dan Israel dengan adanya kunjungan tersebut menyebabkan bangkitnya intifadah kedua. Pemahaman mengenai konflik terdapat dalam buku yang berjudul *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management, and Transformation of Deadly Conflicts*, Hugh Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse merumuskan konflik sebagai berikut:

> "Konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling bertentangan dan memiliki tujuan yang tidak sejalan, terutama yang menyangkut aspek-aspek perubahan sosial. Yang menjadi akar permasalahan kemudian adalah bagaimana seseorang atau sekelompok mengelola konflik dengan mengidentifikasi sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang mampu bertahan lama di dalam kelompok-kelompok yang bertikai. Resolusi konflik merupakan salah satu pilihan yang selalu menjadi rekomendasi dalam setiap penyelesaian konflik" (Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse, 1999: 58- 61).

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan konflik lama yang berkepanjangan dimana didalamnya melibatkan banyak negara diantaranya negara-negara Arab dan Amerika serikat termasuk organisasi internasional seperti PBB. Setelah mendapatkan Resolusi PBB no.181 tahun 1947, Israel akan berdiri di tanah Palestina dengan luas 56% dari keseluruhan wilayah Palestina dan setelah memerdekakan dirinya pada tahun 1948, Israel melakukan pendudukan terhadap wilayah Palestina tanpa memperdulikan Resolusi yang telah dikeluarkan yang mengakibatkan hampir seluruh wilayah Palestina jatuh ke tangan Israel dan berakibat pada peperangan Arab-Israel tahun 1948-1949. Israel yang sejak lama memimpikan tanah Palestina bekerjasama dengan AS sehingga mendapat sokongan dana maupun peralatan militer untuk merealisasikan impiannya tersebut. Sementara itu untuk mempertahankan tanahnya bangsa Palestina sendiri mendapat dukungan dari negara-negara Arab.

Dalam hukum internasional peristiwa perebutan wilayah atau tanah Palestina tersebut masuk ke dalam sengketa internasional. Istilah sengketa-sengketa internasional mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara-negara, melainkan juga kasus-kasus yang lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional. Yakni beberapa kategori sengketa tertentu antar negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain.

Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori:

1. Cara-cara penyesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu, apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Metode-metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat dapat di bagi dalam klasifikasi sebagai berikut:

1. Arbitrasi (*arbitration*) adalah suatu institusi yang sudah cukup tua yaitu dengan menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dinamakan para arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh para pihak, mereka yang memutuskan tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum.
2. Penyelesaian yudisial (*judicial settlement*) berarti penyelesaian dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.
3. Negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*) mediasi, konsiliasi adalah metode-metode yang kurang begitu formal dibandingkan dengan penyelesaian Yudisial atau

arbitrasi.

4. Penyelidikan (*inqury*)
5. Penyelesaian dibawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyeleseikan sengketa-sengketa mereka secara persahabatan maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan:

1. Perang dan tindakan bersenjata non perang.
2. Retorsi (*retorsion*) adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain misalnya merenggangnya hubungan diplomatik, penarikan diri dari dari konsesi-konsesi fiscal dan bea.
3. Tindakan-tindakan pembalasan (*repraisals*) merupakan metode-metode yang digunakan oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dengan melakukan tindakan yang sifatnya pembalasan.
4. Blokade secara damai (*pacific Blockade*) adalah tindakan blokade pada waktu damai.
5. Intervensi (*intervention*) (Starke, 2004: 646-679)

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukan negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian dimana negara yang ditaklukan itu tidak memiliki altematif lain selain mematuhinya. Tindakan bersenjata, yang tidak dapat disebut perang, juga banyak diupayakan. Solusi sengketa tanah antara bangsa Palestina dengan Israel harusnya bisa diselesaikan melalui cara-cara damai atau bersahabat namun yang terjadi justru sebaliknya, selama sejak berdirinya negara Israel di tanah Palestina,

perang maupun konflik bersenjata non-perang lebih banyak digunakan sebagai cara dalam mencari solusi atau justru oleh Israel digunakan untuk menaklukan tanah Palestina.

Konflik antara keduanya belum dapat diselesaikan hingga sekarang meskipun telah banyak perjanjian-perjanjian atau kesepakatan perdamaian seperti Perjanjian Camp David dan Perjanjian Oslo yang pernah dibuat, namun sifatnya hanya sementara, selang beberapa waktu konflik baru dan sifatnya lebih besar kembali terjadi.

Dalam buku *Pengantar Hukum Internasional* Hall mengemukakan definisi tentang perang yang secara hukum diterima dalam perkara *Driefontein Consolidated Gold Mines v Janson*:

> "Apabila perselisihan antara negara-negara mencapai suatu titik dimana kedua belah pihak berusaha untuk memaksa, atau salah satu dari mereka melakukan tindakan kekerasan, yang dipandang oleh pihak lain sebagai suatu pelanggaran perdamaian, maka terjadi hubungan perang, dimana pihak-pihak yang bertempur satu sama lain dapat menggunakan kekerasan sesuai dengan peraturan, sampai salah satu dari mereka menerima syarat-syarat sebagimana yang dikehendaki oleh musuhnya" (Starke, 2004: 699).

Pecahnya perang telah membawa pengaruh luas terhadap hubungan-hubungan antara negara-negara yang terlibat perang. Kasus Palestina-Israel yang melibatkan banyak negara ketika terjadi perang Arab-Israel yang dampaknya sangat mempengaruhi hubungan antara negara-negara yang terlibat perang seperti hubungan antara negara-negara Arab dengan Amerika serikat karena negara-negara Arab dan Palestina menganggap Israel telah melanggar kesepakatan karena telah mengambil hampir seluruh wilayah Palestina secara paksa apalagi sekarang sudah mencapai pada perebutan wilayah Yerusalem dimana terdapat Masjid Al Aqsha.

Dan selama berlangsungnya perang, penduduk sipil selalu menjadi sasaran karena itu suatu upaya telah dilakukan dalam Konvensi Jenewa 1949 untuk perlindungan orang-

orang sipil pada waktu perang (*Geneva Convention for the Protection of Civilian Persons in Time of War*) untuk melindungi beberapa golongan penduduk sipil dari bahaya-bahaya serta kerugian-kerugian yang menimpa prajurit dan non-prajurit pada waktu perang atau konflik bersenjata. Namun, dalam masalah Palestina khususnya pada terjadinya intifadah kedua kenyataan yang terjadi adalah warga sipil selalu menjadi sasaran utama serangan Israel bahwa tidak ada yang menghentikan pembantaian yang terus menerus dilakukan oleh tentara Israel terhadap penduduk sipil Palestina termasuk Konvensi Jenewa 1949 ini dan aturan-aturan dalam hukum internasional bahkan PBB sendiri belum mampu mengatasi koflik antar keduanya hingga kini.

1.4.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan dimana materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berfikir yang dikembangkan (Suriasumantri, 2001 : 12).

Berdasarkan Asumsi-asumsi di atas maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : **"Kunjungan Ariel Sharon Ke Masjid Al Aqsha menyebabkan bangkitnya Intifadah Kedua di Palestina karena dianggap Sebagai Tindakan Yang Memiliki Tujuan Politis Yaitu Penegasan terhadap kedudukan Yerusalem sebagai wilayah kedaulatan Israel".**

1.4.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan kalau kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep. Melalui defenisi seperti itu maka suatu konsep dijabarkan. Dengan demikian, maka defenisi operasional berarti juga menjabarkan

prosedur pengujian yang memberikan kriteria bagi penerapan konsep itu secara empiris (Mas'oed,1990:100).

1. Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsha merupakan kedatangan seorang tokoh yang sangat berpengaruh yaitu sebagai salah satu tokoh politik dan pemimpin partai likud Israel yang dikenal memiliki kebijakan keras dan selalu menentang berbagai kompromi dengan bangsa Palestina khususnya tentang status Yerusalem.
2. Tujuan Politis yaitu tidak mau menarik diri dari daerah pendudukan, memperluas pemukiman penduduk Israel dan menolak melakukan perundingan tentang kedudukan tetap Yerusalem.
3. Intifadah Al Aqsha ialah gelombang kerusuhan yang terjadi pada September 2000 antara orang Arab Palestina dan Israel disebut Intifadah Kedua atau dengan kata lain perang pembebasan nasional bangsa Palestina terhadap pendudukan asing (Yahya, 2005: 8).

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara menggali suatu fenomena dan masalah yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Penulis mencari dan mengidentifikasi objek penelitian seluas mungkin.

Metode Penelitian Historis, digunakan untuk mengungkap peristiwa di masa lalu yang masih ada kaitannya dan mempunyai hubungan yang berkesinambungan dan terus berlangsung hingga saat ini terhadap konteks permasalahan yang sedang dihadapi, berdasarkan sumber data sekunder.

Metode penelitian Deskriptif Analitis, berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut pada masa sekarang.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data di gunakan melalui studi dokumen/studi kepustakaan yang meliputi tulisan-tulisan, situs internet, analisis, artikel, jurnal, surat kabar, dan buku teks yang relevan dengan penulisan.

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian

1.6.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun	Waktu Penelitian					
			Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan judul	2008						
2	Bimbingan skripsi	2008						
3	Rencana UP	2008						
4	Rencana Sidang	2009						

1.6.2 Lokasi Penelitian

Peneliti mengadakan Penelitian sekaligus mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang di butuhkan di tempat-tempat :

1. Perpustakan Universitas Komputer Indonesia

   Jl. Dipati Ukur No. 112-116 Bandung – Jawa Barat. Indonesia.

2. Perpustakaan Universitas Parahyangan, Jl Ciumbuleuit No. 94 Bandung – Jawa Barat. Indonesia.

3. Perpustakaan Universitas Pasundan, Jl Lengkong Besar No. 68 Bandung – Jawa

Barat. Indonesia.

4. Perpustakaan *Center For Strategic and International Studies* (CSIS), Jl. Tanah Abang III/23-27 Jakarta Pusat. Indonesia
5. Kedutaan Besar Palestina, Jl. Diponegoro No. 59 Menteng, 10310 Jakarta Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : *Pendahuluan*, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis serta Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta Lokasi dan Lama Penelitian.

BAB II : *Tinjauan Pustaka*, berisi uraian dan penjelasan teori-teori Hubungan Internasional, Politik Internasional, Hukum Internasional, Politik Luar Negri, Kepentingan Nasional, Pengaruh serta konsep-konsep dalam studi Hubungan Internasional yang relevan dengan penelitian serta mendasari penelitian ini.

BAB III: *Objek Penelitian*, berisi obyek-obyek yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu tentang Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsha serta Kebangkitan Intifadah Kedua di Palestina.

BAB IV : *Analisa dan Pembahasan*, merupakan kajian yang menganalisis dan membahas objek penelitian akan dibahas disini yang didasarkan pada tinjauan pustaka pada Bab II, dalam upaya pengujian hipotesis yang telah diajukan sebelumnya pada Bab I. Bab ini juga merupakan bagian inti dari peneitian.

BAB V : *Kesimpulan dan Saran*. Kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang telah di laksanakan. Sedangkan Saran berisi Pendapat dan kritik agar skripsi dapat lebih objektif.